

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adya Barata, Atep dan Bambang Trihartanto, *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah*. Jakarta, Elex Media Komputindo, 2005.
- Albrecht, W. Steve, Marshall B. Romney, Keith R. Howe. *Deterring Fraud: The Internal Auditor's Perspective*, Institute of Internal Auditor, 1st Edition, 1984.
- Anwar Chairul, *Perusahaan-perusahaan Negara di Indonesia*. Djakarta, BAPPIT Pusat Permata-Djalan Nusantara 22, 1960.
- Anoraga, Panji. *BUMN, Swasta, dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi*. Semarang: Pustaka Jaya, 1994.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- _____, *Kedudukan dan Fungsi BPK dalam Struktur Ketatanegaraan RI. Dalam 70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid: Integritas, Konsistensi Seorang Sarjana Hukum*. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- _____. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- _____. *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*. Bandung: Mujahid Press, 2014.
- Al-Amin, Mufham. *Manajemen Pengawasan*. Jakarta: Kalam Indonesia, 2006.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 2005.
- Ali, H. Masyhud. *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Anandarajah, Kala. *Corporate Governance: A Pratical Approach*. Kualalumpur: Butterworths, 2001.
- Anoraga, Panji. *BUMN, Swasta, dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi*. Semarang: Pustaka Jaya, 1994.

- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- _____, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta, Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____, M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Azhari, Risjad. *Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Bandung: Granesia, 2000.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)*. Jakarta: BPHN, 2010.
- Badan Pemeriksa Keuangan, *Laporan Tahunan BPK-RI Tahun 2004*. Jakarta: Sekretariat BPK, 2004.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Mengenal Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: BPKP, 2000.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1995.
- Bastian, Indra. *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba, 2002.
- Baswier, Revrison. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Belifante, A.D. dan H. Boerhanoeddin Soetan Batoeah. *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Binacipta, 1983.
- Bainbridge, M. Stephen. *The New Corporate Governance in Theory and Practice*, Oxford: Oxford University Press, 2008.

- Clark, Charles Robert. *Corporate Law*, New York: Aspen Publisher, 1986.
- Dignam, Alan dan John Lowry, *Company Law*. London: University of London, 2004.
- Djafar Saidi, Muhammad. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajagrafindo, 2008.
- Djojohadikusumo, Soemitro. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Pembangunan Djakarta, 1957.
- Dolg, Alan. *Fraud: Crime and Society Series*, Oregon USA: Willan Publishing, 2006.
- Donahue, D. John. *The Privatization Decision: Public, End, Private Means*. USA: Basicbooks, 1989.
- Eckstein, Otto. *Keuangan Negara (Public Finance)*. Diterjemahkan oleh St. Dianjung. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Fahrojih, Ikhwan. *Pengawasan Keuangan Negara: Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR*. Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Ford, H.A.J. *Principles of Company Law*, Fifth Edition, Sidney: Butterworths, 1990.
- Frederickson, H. George. *Administrasi Negara Baru (New Public Administration)*. Diterjemahkan oleh Al-Ghoezei Usman. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Freeman, M.D.A. *Introduction to Jurisprudence*. Eight Edition. LLOYD'S. Sweet & Maxwell. Published: Thomson Reuters, 2008.
- Friedman, M. Lawrence. *American Law: an Introduction*, edisi kedua, 1998, terjemahan oleh Wishnu Basuki dengan bantuan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Jakarta: Tata Nusa, 2001.
- Friedman, W. *Legal Theory*, Fifth Edition, New York: Columbia University Press, 1967.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

- Gautama, Sudargo. *Komentaris atas Undang-undang Perseroan Terbatas (Baru)*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Hadhikusuma, Sutantya Rahardja dan Sumantoro, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali, 1991.
- Hartono, Sunarjati. *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.
- _____, *Penelitian Hukum di Pada Akhir Abad ke-20*, ed. 1. Bandung: Alumni, 1994.
- Hariningsih, Sri. *Jenis dan Fungsi Serta Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*, dalam Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Harun, Refly. *Hukum BUMN (Badan Usaha Milik Negara)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2020.
- Hyman, N. David. *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*. South-Western: Mason, 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan (1): Jenis, Fungsi, Materi Muatan*. Kanisius: Jakarta, 2007.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Kamerman, B. Sheila and Alfred J. Kahn, *Privatization and the Welfare State*. Pricenton.
- Khairandy Ridwan dan Camelia Malik. *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: PT. Kreasi Total Media, 2007.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel, 1971.

- _____. _____, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 9. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: UI Press, 2001.
- Moynihan, P. Donald. *Citizen Participation in Budgeting: Prospects for Developing Countries*, Anwar Shah (ed.), from Participatory Budgeting. Washington D.C: The World Bank, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Nasution, Anwar. *Pokok Pikiran Anwar Nasution: Menuju Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretaris Jenderal BPK RI, 2008.
- OECD *Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises*, 2005.
- Otoritas Jasa Keuangan dan *International Finance Corporation*, 2014, *The Indonesia's Good Governance Manual*.
- Rachman Saleh, Abdul, Hani Hasjim, Hadi Mustofa Djuraid dan Irwan Suhanda, *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustad: Memoar 930 Hari di Puncak Gedung Bundar*. Jakarta: Buku Kompas, 2008.
- Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan: Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Pennington, R. Robert. *Company Law*, Eight Edition, Birmingham: Butterworths, 2001.
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995*. Bandung: Alumni, 1995.
- Said, Natsir. *Perusahaan-Perusahaan Pemerintah di Indonesia Ditinjau dari Segi Hukum Perusahaan*. Bandung: Alumni, 1985.
- Salmon, D. Lewis, Donald E.Schwartz, Jeffry D. Bauman, and Elliot J. Weiss. *Corporation Law anda Policy Materials and Problems*, 4th Edition, St. Paul. Minn: West Group, 1998.

- Savas, S. E. *Privatization: The Key to Better Government*. New Jersey: Chatham House, 1987.
- Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan. *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, 2000.
- Serfianto, Iswi Hariani, R dan Cita Yustisia, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan: Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV Utomo, 1986.
- Sidharta, Bernard Arief. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatika*, dalam Sulistyowati dan Sidharta (ed). Jakarta: Yayasan Obor, 2009.
- Silalahi, Udin M. *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*, Badan Penerbit: Iblam. Jakarta: 2005.
- Simatupang, Dian Puji Nugraha. *Paradoks Rasionalitas, Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011.
- _____. *Determinasi Kebijakan Anggaran Indonesia. Studi Yuridis*. Jakarta: PT. Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Simatupang, Mawardi. *BUMN Pasca UU BUMN, Dalam BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan, dan Strategi*, disunting oleh Riant Nugroho D dan Ricky Siahaan. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Smits, Jan M. *The Mind and Method of the Legal Academic*. Edward Elgar Publishing Limited, 2012.
- Sinamo, Nomenson. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2001.
- Soekanto, Soerjono., et.al., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 10. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soenarko, R. *Susunan Negara Kita*. Jilid II. Jakarta: Djambatan, 1950.

- Sri, Neni Imaniyati. *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009.
- Subagio, M. *Hukum Keuangan Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara: Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sulaiman, Alfin. *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Sutojo, Siswanto. *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2005.
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Suyatno, Thomas *et al.* *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2001.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Balairung, 2003.
- Teguh, Pratama Harrys. *Hukum Keuangan Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2019.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Tjandra, W. Riawan. *Dinamika Peran Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi: Analisis Kritis terhadap Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2004.
- Tuanakotta, M Theodorus. *Menghitung Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Salemba 4, 2009.
- Widjaja, Sastra. *Bunga Rampai Hukum Dagang*. Bandung: Alumni, 2005.
- Widjaya, I. G. Rai. *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-undang di Bidang Usaha: Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2000.
- Wignjosubroto, Soetandyo. *Ragam-ragam Penelitian Hukum*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, ed.1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Utrecht, E (1). *Dasar-dasar Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1959.

_____ (2), *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1964.

B. Artikel dan Karya Tulis Ilmiah:

Adji, Indriyanto Seno. *Pidana Mati bagi Koruptor sebagai upaya Pemberantasan Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999*. (Makalah disampaikan dalam diskusi panel dengan tema “Pidana Mati bagi Koruptor sebagai upaya Pemberantasan Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999” yang dilaksanakan pada 30 Maret 2000 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok).

_____. *Kebijakan Aparatur Negara dan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiil dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Dalam Gagasan dan Pemikiran tentang Pembaharuan Hukum Nasional Volume III. Jakarta: Tim Pakar Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004.

ACFE. *Report to The Nations on Occupational Fraud and Abuse*, Texas, USA: ACFE, 2010.

Aprilianda, Nurini. *Materi Metode Penelitian Hukum*, Universitas Brawijaya, 2 Februari 2020.

Atmadja, Arifin. P. Soeria. *Kedudukan Negara dalam Perseroan Terbatas yang Seluruh Saham dan Sebagian Sahamnya Dimiliki Negara* (Makalah dalam Diskusi Internal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002).

Djalil, Sofyan A. *Pentingnya Implementasi Good Corporate Governance Bagi BUMN*. (Makalah Lokakarya GCG, Jakarta).

Hartini, Rahayu. *Harmonisasi Konsep Keuangan Negara Terhadap Kepailitan BUMN Persero Demi Menjamin Kepastian Hukum*. Pidato Pengukuhan Guru Besar (Prof.) Dr. Hj. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum sebagai Guru Besar Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu 17 Desember 2011.

Hutagaol, D. Henry. *Status Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara: Sebagai Keuangan Negara*. Diskusi Pemikiran Profesor Arifin P. Soeria Atmadja III, Diskursus Anak Perusahaan BUMN Sebagai Keuangan Negara: Fallacy Theory? Diselenggarakan oleh Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 17 Februari 2021.

- LeRoy, Roger dan Gaylod A. Jentz, *Business Law Today, Text and Cases*, Mason: South Western Cengage Learning, 2012.
- Mardiana, I Ketut. *Corporate Governance dan Privatisasi. Reformasi Ekonomi 2* (Oktober-Desember 2000).
- Maroef, Taufik Mappaenre. *Masalah Hukum Penyelesaian Utang Piutang Negara Melalui BPPN* (Makalah yang disampaikan dalam Seminar Perbankan, Jakarta 13 Juli 1999).
- Nursadi, Harsanto. *Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah: Transfer Pusat ke Daerah, Pemerataan Keuangan Daerah, dan Kapasitas Daerah*, Jurnal Hukum & Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI, 2009.
- Maszurdi, Mochamad. *Kedudukan Dewan Komisaris dalam Perspektif Hubungan dengan Pemerintah*. Cakrawala 3 (Oktober-Desember 1999).
- Mulyana, N. Asep. *Business Judgment Rule: Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*. Jakarta: PT. Grasindo, 2018.
- Nasution, Faisal Akbar. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*. Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 41 No. 4, 2011
- Panjaitan, P Saut. *Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara*.
- Prasetya, Rudhi. *Pendirian Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris serta Pihak Terkait Lainnya* (Makalah dalam Seminar Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta 24 September 2001).
- Prasojo, Ratnawati W. *Pendirian Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris serta Pihak Terkait Lainnya* (Makalah yang disampaikan dalam Seminar Dengar Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, 24 September 2001).
- Simatupang, Dian Puji N. *Rekonstruksi Hukum Badan Usaha Milik Daerah: Analisis Kelemahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan dan Rekomendasi Perubahannya*. Makalah dalam workshop Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 11-12 Februari 2008.
-
- _____. *Pro Causa Non Causa Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Keuangan Negara*. Diskusi Pemikiran

Profesor Arifin P. Soeria Atmadja III, Diskursus Anak Perusahaan BUMN Sebagai Keuangan Negara: Fallacy Theory? Diselenggarakan oleh Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 17 Februari 2021.

Sinaga, Patuan. *Hubungan antara Kekuasaan dengan Pouvoir Discretionnaire dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.*

Tumbuan, Fred B.G. *Langkah-langkah Strategis Reorganisasi dan Restrukturisasi Perusahaan* (Makalah yang disampaikan dalam Seminar Dengar Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta 25 September).

Wignjosuebrotu, Soetandyo. Menggagas Terwujudnya Peradilan yang Independen dengan Hakim Profesional yang Tidak Memihak, Buletin Komisi Yudisial, Volume Nomor 3, Desember 2006.

C. Jurnal Internasional:

AR, Suhariyono. *Peningkatan Kualitas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 4, Nomor 2, Juni 2007.

Attamimi A. Hamid S. *Pengertian Keuangan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 3, Tahun XI, Mei 1981.

_____. *Undang-undang Perhitungan Negara: Perlukah itu?* Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Bacon, A. Leigh. “Freedom of or ‘Freedom From’? The Enforceability of Contracts and The Integrity of LLC”, 2001, Duke Law Journal, Volume 50.

Blumberg, I Phillip. *Limited Liability & Corporate Groups*, 11 J.Corp 1, 1986. Dalam Martin Petrin, *Reconceptualizing the Theory of the Firm-From Nature to Function*, Penn State Law Review, Summer 2013.

Cadbury, Sir Andrian. *Corporate Governance: A Framework for Implementation*. London: t.p., 1999.

Capalbo, Francesco. *Australian Accounting Business and Finance Journal, The Imperfect Match of Public Accountability of State-owned Enterprises and*

the Private-sector Type Financial Reporting: The Case of Italy, Volume 7, 2013.

Coates, John C. *State Takeover Statutes and Corporate Theory: The Revival of an Old Debate*, New York University Law Review, Vol. 64, 1989.

Gingerich, Duane J. & Sri Indrastuti Hadiputranto. *Good Corporate Governance-Indonesia*, *International Financial Law Review*, *The IFLR Guide to Corporate Governance*, 2002.

Matheson, H. John. *Why Courts Pierce; An Empirical Study of Piercing the Corporate Veil*, *Barkeley Bus L.K.I*, 2010. Dalam Martin Perkin, *Reconceptualizing the Theory of the Firm-From Nature to Function*, *Penn State Law Review*, Summer 2013.

Mülbert, Peter. O. *Corporate Governance on Banks*, *European Business Organization Law Review* 10, 2009.

Ntongho, Rachael Ajomboh Ntongho. *Culture and Corporate Governance*, *International Journal of Law and Management; Patrington* Vol. 58, Iss. 5, 2016.

OECD, *G20/OECD Principles of Corporate Governance*, Turki: OECD, 2015.

OECD Trade Policy Papers Number 147, *State-owned Enterprises: Trade Effects and Policy Implications*, 2013.

Pham, Trang Thi Kieu. *The Relationship Between Corporate Governance and the Performance of the Firm: a Literature Review With a Focus on the Vietnamses Enterprises*, *International Conference on Management, Leadership & Governance*, 2016.

Peebles, A. Ralp. *The Use and Misuse of The Business Judgment Rule in the Close Corporation*, *Notre Dame Law Review*, 1985.

Pickering, Murray A. *The Company As a Separate Legal Entity*. *The Modern Law Review*, No. 5. Volume 31, September 1968.

Rose, Paul. *Corporate Governance Industry*, *Journal of Corporation Law: Iowa City*, Vol. 32, Iss.4, 2007.

Ubelaker, Healy Michele. *Director Liability Under the Business Judgment Rule: Fact or Fiction*, *Jurnal* 35 SwL.J. 775, 1981.

D. Disertasi:

Admadja, Arifin P Soeria. *Segi Hukum Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Menurut ICW 1925 dan Undang-Undang Dasar 1945*, pada April 1983.

Amachi, Tubagus Chairul. *Kebijakan Tentang Profesi Akuntan Publik Menurut Perspektif Good Governance di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok: Universitas Indonesia, 2012.

Ambuwaru, N. Pininta. *Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Hukum Perusahaan Dalam Rangka Meningkatkan Perannya Untuk Mendukung Perekonomian Daerah*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, pada 10 Februari 1992.

Harris, Freddy. *Kedudukan Negara Sebagai Penyertaan Modal Dalam PT Persero: Pengubahan Ketentuan Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Hukum Perusahaan*, pada 23 Juli 2007.

Makarim, Edmond. *Tanggung jawab penyelenggara terhadap tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan sistem elektronik (good electronic governance)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: Universitas Indonesia, 2009.

Simatupang, Dian Puji N. *Paradoks Rasionalitas, Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Progra Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: Universitas Indonesia, 2011.

Sukarja, Detania. *Implikasi Teoritis Dari Pemaknaan Keuangan Negara Dalam Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam BUMN Melalui Pembentukan Holding Company*, pada 10 Juli 2015.

E. Perundang-undangan:

Undang-undang:

Indonesia (1), *Undang-undang tentang Keuangan Negara*, UU Nomor 17 Tahun 2003. LN Nomor 47 Tahun 2003, TLN Nomor 4287.

_____ (2), *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007. LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756.

_____ (3), *Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU Nomor 19 Tahun 2003. LN Nomor 70 Tahun 2003, TLN Nomor 4297.

_____ (4), *Undang-undang tentang Ketenagakerjaan*, UU Nomor 13 Tahun 2003. LN Nomor 10 Tahun 2003, TLN Nomor 1123.

_____ (5), *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011. LN Nomor 82 Tahun 2011, TLN Nomor 5234.

_____ (6), *Undang-undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 15 Tahun 2019. LN Nomor 183 Tahun 2019, TLN Nomor 6398.

_____ (7) *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*

_____ (8), *Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 23 Tahun 2014. LN Nomor 244 Tahun 2014, TLN Nomor 5587.

_____ (9), *Undang-undang tentang Perusahaan Daerah*, UU Nomor 5 Tahun 1962. LN Nomor 10 Tahun 1962, TLN Nomor 2387.

_____ (10), *Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan*, UU Nomor 15 Tahun 2006. LN Nomor 85 Tahun 2006, TLN Nomor 4654.

_____ (11), *Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)*, UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960. LN Nomor 156 Tahun 1960.

_____ (12), *Undang-undang tentang Perbankan*, UU Nomor 7 Tahun 1992. LN Nomor 31 Tahun 1992, TLN Nomor 3472.

_____ (13), *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU Nomor 10 Tahun 1998. LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790.

- _____ (14), *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____ (15), *Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 30 Tahun 2002. LN Nomor 137, TLN Nomor 4250.
- _____ (16), *Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 6 Tahun 1964 tentang Pembentukan BPK (LN Nomor 41 Tahun 1964) menjadi UU*, UU Nomor 17 Tahun 1965. LN Nomor 79 Tahun 1965, TLN Nomor 2779.
- _____ (17), *Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)*, UU Nomor 15 Tahun 2006. LN Nomor 85 Tahun 2006. TLN Nomor 4654.
- _____ (18), *Undang-undang tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, UU Nomor 15 Tahun 2004. LN Nomor 66 Tahun 2004. TLN Nomor 4400.
- _____ (19), *Undang-undang tentang BPK*, UU Nomor 5 Tahun 1973.
- _____ (20), *Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, UU Nomor 17 Tahun 2014. LN Nomor 182 Tahun 2014. TLN Nomor 5568.
- _____ (21), *Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU Nomor 28 Tahun 2009. LN Nomor 130 Tahun 2009. TLN Nomor 5049.
- _____ (22), *Undang-undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti-Korupsi 2003)*. UU Nomor 7 Tahun 2006. LN Nomor 32 Tahun 2006, TLN Nomor 4620.
- _____ (23), *Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara*. UU Nomor 1 Tahun 2004. LN RI Nomor 5 Tahun 2004. TLN RI Nomor 4355.
- _____ (24), *Undang-undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. UU Nomor 28 Tahun 1999. LN RI Tahun 1999, Nomor 75. TLN RI Nomor 3851.
- _____ (25), *Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 31 Tahun 1999. LN RI Tahun 1999, Nomor 140. TLN RI Nomor 3874.

Undang-undang lainnya:

Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang.*

_____, *Undang-undang tentang Memberi Ketentuan Kedudukan Hukum Kepada Bank Industri Negara.* UU Nomor 5 Tahun 1952.

_____, *Undang-undang tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda.* UU Nomor 86 Tahun 1958.

_____, *Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Perusahaan Negara.* Perpu Nomor 19 Tahun 1960.

_____, *Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).* UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

_____, *Undang-undang tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Perpu.* UU Nomor 6 Tahun 1969.

_____, *Undang-undang tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi UU.* UU Nomor 9 Tahun 1969.

_____, *Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah* (yang kemudian dirubah pada tahun 1999, 2004, 2008, dan 2014). UU Nomor 5 Tahun 1974.

_____, *Undang-undang tentang Bank Indonesia.* UU Nomor 23 Tahun 1999.

_____, *Undang-undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* UU Nomor 20 Tahun 2001. LN Nomor 134 Tahun 2001. TLN Nomor 4150.

_____, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.* UU Nomor 3 Tahun 2004.

_____, *Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.* UU Nomor 15 Tahun 2004.

_____, *Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.* UU Nomor 19 Tahun 2004.

_____, *Undang-undang tentang Lembaga Penjaminan Simpanan,* UU Nomor 24 Tahun 2004. LN Nomor 96 Tahun 2004, TLN Nomor 4420.

_____, *Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, UU Nomor 33 Tahun 2004. LN Nomor 126 Tahun 2004, TLN Nomor 4438.

_____, *Perpu tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Perpu Nomor 2 Tahun 2014.

_____, *Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU*. UU Nomor 2 Tahun 2015.

_____, *Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 9 Tahun 2015.

_____, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU Nomor 15 Tahun 2019.

_____, *Undang-undang tentang Perhitungan Negara* (setiap tahunnya dibuat UU ini).

Ketetapan MPR:

Indonesia, *Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001 mengenai kewenangan BPK*.

Peraturan Pemerintah:

Indonesia (PP-1), *Peraturan Pemerintah tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN*. PP Nomor 45 Tahun 2005.

_____, (PP-2), *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perseroan Terbatas (PT)*. PP Nomor 44 Tahun 2005.

_____, (PP-3), *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. PP Nomor 27 Tahun 2014.

_____, (PP-4), *Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan*. PP Nomor 55 Tahun 2005.

_____, (PP-5), *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. PP Nomor 58 Tahun 2005.

_____ (PP-6) *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang.

Peraturan Pemerintah Lainnya:

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara*. PP Nomor 65 Tahun 1999. LN No. 126, Tahun 1999, TLN No. 3836.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural*. PP Nomor 100 Tahun 2000. LN No. 197, Tahun 2000, TLN No.4018.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara*. PP Nomor 45 Tahun 2005. LN No. 117, Tahun 2005, TLN No. 4556.

Peraturan Presiden:

Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian*. PerPres Nomor 3 Tahun 2013.

_____, *Peraturan Presiden tentang BPKP*. PerPres Nomor 192 Tahun 2014.

Instruksi Presiden:

Indonesia, *Instruksi Presiden RI tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat*. InPres Nomor 1 Tahun 1989.

Keputusan Presiden:

Indonesia, *Keputusan Presiden tentang BPKP*. KepPres Nomor 31 Tahun 1983.

Peraturan Menteri:

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Bentuk Badan Hukum BUMD*. Permendagri Nomor 3 Tahun 1999.

_____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan*. Permendagri Nomor 153 Tahun 2004.

_____, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

_____, *Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara*. PerMen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011.

_____, *Peraturan Menteri BUMN tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/Mbu/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara*. PerMen BUMN Nomor Per-09/MBU/2012.

_____, *Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara*. PerMen BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015.

_____, *Peraturan Menteri BUMN tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN*. PerMen BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020.

_____, *Peraturan Menteri BUMN tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara*. PerMen BUMN Nomor PER-15/MBU/2012.

Keputusan Menteri:

_____, *Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara tentang Pengembangan Praktek Good Corporate Governance dalam Perusahaan Perseroan (Persero)*. SK Meneg/Ka BPMPBUMN No. Kep-23/M-Pm.PBUMN/2000.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI:

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 77/PUU-X/2011, yang diputus pada tanggal 25 September 2012. Permohonan mana diajukan secara resmi pada tanggal 25 Oktober 2011. Mengenai uji materi Pasal 4, 8, 10, dan 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, yang diputus pada tanggal 23 Oktober 2012. Permohonan mana diajukan secara resmi pada tanggal 7 Maret 2012. Mengenai permohonan uji materi Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menyatakan bahwa BPKP memiliki kewenangan dalam menentukan Kerugian Negara. Terhadap Putusan ini menyatakan bahwa status hukum keuangan BUMN/BUMD adalah Keuangan Negara/Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013, yang diputus pada tanggal 18 September 2014. Permohonan mana diajukan secara resmi pada tanggal 12 April 2013. Mengenai permohonan uji materi Pasal 2 huruf g dan i Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa status hukum keuangan BUMN/BUMD sebagai Keuangan Negara/Keuangan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, yang diputus pada tanggal 18 September 2014. Permohonan mana diajukan secara resmi pada tanggal 27 Mei 2013. Mengenai permohonan uji materi Pasal 2 huruf g dan i Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyatakan bahwa MK menolak permohonan uji materi (*Judicial Review*) Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Atas putusan ini, MK menyatakan bahwa keuangan BUMN/BUMD adalah Keuangan Negara/Daerah.

SEMA RI:

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.*

Fatwa Mahkamah Agung RI:

Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006, tanggal 16 Agustus 2006 tentang *Piutang BUMN*. Fatwa ini ditujukan kepada Menteri Keuangan RI yang didasarkan atas permintaan dari Menteri Keuangan pada suratnya Nomor S-324/MK.01/2006, tanggal 26 Juli 2006.

Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor 038/KMA/2009, tanggal 2 April 2009. Fatwa ini ditujukan kepada Menteri Keuangan RI yang didasarkan atas permintaan dari Menteri Keuangan pada suratnya Nomor S.19/MK.06/2009, tanggal 12 Januari 2009.

Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor 127/KMA/VIII/2010, tanggal 25 Agustus 2010. Fatwa ini ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Darat pada Markas Besar Angkatan Darat yang didasarkan atas permintaan dari Kepala Staf Angkatan Darat pada suratnya Nomor B/1653/VIII/2010, perihal *permohonan fatwa hukum*, tanggal 9 Agustus 2010.

F. Internet:

Boyle, A.J. “Minority Shareholder Rule”, Cambridge University: *Foss v. Harbottle*.
http://assets.cambridge.org/052179/1065/excerpt/0521791065_excerpt.pdf.

Hans-Hass, *Energon Theory, The Hidden Common Feature in the Evolution of Life* http://www.hans-hass.de/Englisch/Energon/1.1_The_hidden-common_feature.html.

<http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples>, diakses pada 8 Juli 2020.

<http://www.bpkp.go.id>, diakses pada 16 September 2020.

National Library of Singapore (*online*). *Scope and Responsibilities of Government Finance*, <http://was.nl.sg/details/app.mof.gov.sg.index.aspx.html> (27 Maret 2020).

OECD for Economic Co-Operation and Development, 2005, *OECD Principles on Corporate Governance of State-Owned Enterprises*, <http://www.oecd.org/daf/ca/>, diakses pada 8 Juli 2020.

Steven Bainbridge, “The Business Judgment Rule”, UCLA Law Faculty, <http://www.professorbainbridge.com>, yang diakses pada 8 Juni 2020.

G. Majalah:

Maridana, I Ketut. *Corporate Governance dan Privatisasi, Reformasi Ekonomi 2* (Oktober-Desember 2000).

Maszurdi, Mochamad. *Kedudukan Dewan Komisaris dalam Perspektif Hubungan dengan Pemerintah. Cakrawala 3* (Oktober-Desember 1999).

- Noor, Poezi. Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara: Suatu Tinjauan Hukum. *Ekonomica 2* (Januari-Maret 2000).
- Noor, Poezi. Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara: Suatu Tinjauan Hukum. *Ekonomica 2* (Januari-Maret 2000).
- Prakarsa, Wahyudi. *Corporate Governance: Suatu Keniscayaan. Reformasi Ekonomi 2* (Oktober-Desember 2000).
- Rajagukguk, Erman. Hukum Bisnis Indonesia yang Dicita-citakan dalam Hubungannya dengan Etika Bisnis. *Usahawan 7* (Juli 1993).
- Rasjid, Al Harun. *Pengertian Keuangan Negara*, Majalah Bulanan Keuangan, Nomor 93/9-1979.
- Sullivan, John D. *Corporate Governance: Transparansi antara Pemerintahan dan Bisnis. Reformasi Ekonomi 2* (Oktober-Desember 2000).
- Sutantyo, M. Kedudukan Pemerintah dalam Perseroan Terbatas Milik Negara. *Warta Ekonomi* (Juli 1995).
- WORLD BANK, *Corporate governance will lead the way in attracting more investors to Indonesia*, Publication: M2 Presswire; Coventry, 2002.
- H. Kamus:**
- Black Law Dictionary*, Eight Edition. Editor in Chief: Bryan A. Garner. Thomson West.
- Pusat Bahasa Indonesia Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke empat. Jakarta Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.